

THE ROLE OF PANCASILA IN NATIONAL INTEGRATION: STRATEGIES FOR ADDRESSING SOCIAL CHALLENGES AND DIVERSITY IN INDONESIA

Bambang Yuniarto

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Bb_yunior@yahoo.co.id

Tari Sriningsih

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
tarisriningsih24@gmail.com

Prita Oktavia

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
pritaoktavia079@gmail.com

Azra Syeren Fadila

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
azrasyerenfadila@gmail.com

Anita Sari

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
anitasari0132007@gmail.com

Faiha Az-Zahra Khan

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
faihaazzahrakhan@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the role of Pancasila in maintaining national integration in Indonesia, as well as to identify social challenges that potentially threaten national unity. The main issues include the persistence of intolerance, social inequality, and the negative influences of globalization and digital media which weaken the value of unity. These issues demand an in-depth review of the effectiveness of Pancasila as a filter and unifying agent in this disruptive era. The research method employs a qualitative approach with literature study as the primary data source. The analysis was conducted by examining literature on the implementation of Pancasila's values in societal life and educational practices in Indonesia. The analytical focus was placed on identifying the mechanisms that make the principles of Pancasila relevant in responding to horizontal conflicts. The results indicate that Pancasila plays a crucial role as an ideological foundation capable of uniting diversity through its core values. Pancasila serves as a guideline in building national character and directing public policies to be oriented towards the interests of all people. Strengthening the internalization of Pancasila's values through character education and inclusive policies is the main strategy for preventing national disintegration. Therefore, systematic and continuous efforts are needed to implement the values of Pancasila by emphasizing cross-cultural dialogue and the enforcement of just laws, so that national integration can be maintained amidst the challenges of the modern era. This study recommends the reactivation of national forums as a means to consolidate the values of the state's foundation.

Keywords: National Integration, Pancasila, Social Challenges, Character Education, Diversity

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila dalam menjaga integrasi nasional di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan sosial yang berpotensi mengancam persatuan bangsa. Permasalahan utama mencakup masih adanya intoleransi, ketimpangan sosial, dan pengaruh negatif globalisasi serta media digital yang melemahkan nilai persatuan. Isu-isu ini menuntut tinjauan mendalam mengenai efektivitas Pancasila sebagai filter dan perekat di era disrupsi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai sumber utama data. Analisis dilakukan melalui penelaahan literatur mengenai implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan praktik pendidikan di Indonesia. Fokus analisis diletakkan pada identifikasi mekanisme yang menjadikan sila-sila Pancasila relevan dalam merespons konflik horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar ideologis yang mampu menyatukan keberagaman melalui nilai-nilai intinya. Pancasila menjadi pedoman dalam membangun karakter kebangsaan dan mengarahkan kebijakan publik agar berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat. Penguatan internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan karakter dan kebijakan inklusif menjadi strategi utama dalam mencegah disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam mengimplementasikan nilai Pancasila dengan menekankan dialog lintas budaya dan penegakan hukum yang adil agar integrasi nasional tetap terjaga di tengah tantangan era modern. Penelitian ini merekomendasikan reaktivasi forum kebangsaan sebagai sarana konsolidasi nilai-nilai dasar negara.

Kata Kunci: Integrasi Nasional, Pancasila, Tantangan Sosial, Pendidikan Karakter, Kebhinekaan

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling beragam di dunia, dengan ratusan suku, ragam budaya, bahasa, agama, dan tradisi yang berbeda di setiap wilayah. Keragaman ini, pada satu sisi, adalah kekayaan: warisan budaya dan pluralitas identitas yang membuat Indonesia unik. Namun di sisi lain, keragaman tersebut juga menyimpan potensi konflik sosial apabila perbedaan tidak dikelola dengan baik. Pernyataan ini ditegaskan oleh sejumlah riset bahwa keragaman sosial-budaya dapat memunculkan ketegangan dan fragmentasi apabila tidak disertai mekanisme integrasi sosial yang efektif (Gani & Sembiring, 2023). Dalam konteks manajemen perbedaan, integrasi sosial menjadi kunci utama. Mekanisme integrasi ini meliputi upaya-upaya sistematis untuk membangun kohesi sosial, pengakuan kesetaraan hak, dan penegakan keadilan distributif di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Tanpa adanya kerangka kerja yang kuat untuk menjamin bahwa setiap identitas merasa diakui dan mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya serta partisipasi publik, potensi konflik yang bersumber dari isu primordialisme dan ketidaksetaraan struktural akan sulit dihindari, sehingga menghambat proses pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam konteks demikian, integrasi nasional menjadi sangat penting bagi kelangsungan dan keutuhan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bersama hadir bukan semata sebagai simbol, melainkan sebagai instrumen normatif dan kultural untuk menyatukan keberagaman tersebut. Berangkat dari nilai-nilai seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial, Pancasila diharapkan mampu menjadi pijakan bersama bagi seluruh warga negara dalam bingkai kebangsaan yang inklusif. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian mutakhir, Pancasila tetap relevan dalam menjaga persatuan dan integrasi bangsa, terutama di masa perubahan dan tantangan global (Taher, 2021). Implikasi praktis dari peranan Pancasila sebagai sarana integrasi ini adalah kebutuhan untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut secara konsisten melalui sistem

pendidikan, kebijakan publik, dan praktik kehidupan bermasyarakat. Internalisasi ini bukan hanya bertujuan pada pengakuan formal, melainkan pada pembentukan kesadaran kolektif bahwa keberagaman yang ada merupakan aset (kekuatan) yang harus dikelola, bukan sebagai sumber potensi konflik. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai filtrasi terhadap ideologi-ideologi transnasional yang berpotensi mendegradasi semangat persatuan, sekaligus memandu praktik kewarganegaraan yang menjunjung tinggi toleransi dan musyawarah mufakat.

Namun demikian, meskipun Pancasila secara konstitusional dan ideologis telah diakui, kenyataan sosial kontemporer menunjukkan bahwa tantangan terhadap integrasi nasional terus muncul, baik berupa ketegangan/kesalahpahaman antarkelompok agama, suku, maupun budaya; ketimpangan sosial dan ekonomi antardaerah; serta pengaruh globalisasi yang membawa arus nilai dan identitas baru yang dapat memecah kebersamaan (Sa'duh & Nelwati, 2024). Oleh karena itu, sangat mendesak untuk mengevaluasi bagaimana peran Pancasila dapat dikreasikan secara nyata menjadi strategi integrasi nasional yang efektif, bukan hanya secara simbolik, tetapi secara implementatif di tengah masyarakat yang plural. Upaya rekreasi peran Pancasila ini menuntut adanya pendekatan yang transformatif, yang bergerak dari sekadar hafalan dan doktrin menjadi internalisasi nilai yang terwujud dalam perilaku sehari-hari warga negara, terutama pada generasi muda sebagai aktor penentu masa depan bangsa. Transformasi ini perlu didukung oleh kebijakan publik yang inklusif, yang secara tegas mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan musyawarah ke dalam kerangka pembangunan nasional, sehingga mampu mereduksi akar permasalahan ketimpangan dan memfasilitasi ruang dialog konstruktif antarwarga negara untuk memperkuat kohesi sosial Indonesia.

Penelitian ini hadir dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam “bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai fondasi dalam integrasi nasional”, “tantangan sosial apa saja yang mengancam persatuan di Indonesia”, serta “strategi berbasis nilai Pancasila apa yang relevan untuk mengatasi tantangan tersebut”. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan, khususnya dalam bidang studi kewarganegaraan, ilmu sosial, dan pendidikan karakter kebangsaan serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan aktor masyarakat dalam upaya memperkuat persatuan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan berfokus pada analisis konten literatur, dokumen kebijakan, serta data-data empiris terkait implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat multikultural. Peneliti berupaya membedah esensi filosofis Pancasila dan relevansinya sebagai *common platform* (landasan bersama) yang mampu menjembatani perbedaan-perbedaan sosiokultural, sekaligus mengidentifikasi akar masalah disintegrasi melalui studi kasus yang representatif, sehingga hasil kajian ini memiliki basis teoretis yang kuat dan implikasi praktis yang nyata.

Perbedaan pendekatan atau fokus dari penelitian-penelitian terdahulu menjadi alasan penting di balik studi ini. Banyak penelitian yang menekankan pentingnya integrasi nasional atau peran Pancasila, tetapi sedikit yang memetakan secara sistematis tantangan sosial kontemporer dan merumuskan strategi konkret berbasis nilai-nilai Pancasila dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial saat ini. Dengan demikian, penelitian ini berusaha melengkapi dan memperdalam literatur yang ada: menggabungkan analisis normatif-ideologis dengan telaah empiris terhadap tantangan kontemporer, serta merumuskan strategi aplikatif berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti studi ini tidak hanya berhenti pada penegasan urgensi Pancasila sebagai ideologi bangsa, melainkan

bergerak lebih jauh untuk menjawab pertanyaan praktis: bagaimana nilai-nilai fundamental tersebut dapat dioperasionalkan sebagai kerangka solusi atas isu-isu yang spesifik, seperti polarisasi digital, krisis identitas generasi muda, dan degradasi kohesi sosial di era pasca-kebenaran (*post-truth*). Kesenjangan literatur ini menunjukkan perlunya sebuah sintesis yang menghubungkan dimensi filosofis Pancasila dengan tantangan riil di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih relevan dan *up-to-date* bagi perumusan kebijakan dan praktik sosial kemasyarakatan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran Pancasila dalam mendukung integrasi nasional di Indonesia, tantangan sosial apa saja yang dihadapi Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, strategi apa yang dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat integrasi nasional. Sedangkan tujuan penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan peran Pancasila secara teoritis dan praktis dalam integrasi nasional, menganalisis tantangan sosial yang mengancam persatuan bangsa, serta mengusulkan strategi penguatan integrasi nasional yang relevan dengan dinamika sosial saat ini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat heterogenitas masyarakat Indonesia yang berpotensi menimbulkan disintegrasi jika tidak dikelola dengan baik. Melalui kajian mendalam terhadap relevansi nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai perekat kebangsaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan karakter dan kebijakan publik, maupun sebagai panduan praktis bagi *stakeholder* terkait dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat.

Signifikansi penelitian ini cukup besar. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tentang integrasi nasional, ideologi kebangsaan, dan peran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial-politik modern. Dari sisi praktis dan kebijakan, temuan ini dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat luas dalam merancang program pendidikan karakter, kebijakan inklusif, serta upaya membangun kohesi sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga penting untuk implementasi nyata demi menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika dan tantangan zaman. Dengan latar belakang, tujuan, dan urgensi penelitian tersebut, maka artikel ini diharapkan memberi kontribusi berarti pada upaya memperkuat integrasi nasional dan memperdalam pemahaman akademis tentang peran Pancasila dalam kebangsaan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*literature review*) sebagai desain utamanya. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam dan konseptual bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai instrumen integrasi nasional di tengah keragaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti berposisi sebagai instrumen utama dalam mengevaluasi, menafsirkan, dan mensintesis literatur terkait, sebagaimana dijelaskan dalam literatur metodologi penelitian kualitatif (Gopaldas, 2016). Desain studi pustaka (*literature review*) ini melibatkan proses sistematis dalam pengumpulan, penilaian, dan sintesis temuan dari berbagai sumber pustaka, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan Pancasila dan integrasi nasional. Tujuannya adalah

untuk membangun kerangka konseptual yang kokoh (a robust conceptual framework) serta mengidentifikasi pola, kesenjangan (gaps), dan kontroversi dalam literatur yang sudah ada. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data empiris baru di lapangan, melainkan pada eksplorasi teoretis dan analisis komparatif atas konsep-konsep kunci yang telah dikaji sebelumnya, memastikan validitas internal dan kedalaman interpretasi akademis.

Dalam proses pengumpulan data, sumber yang digunakan mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, baik internasional maupun nasional, serta dokumen peraturan perundang-undangan terkait Pancasila dan integrasi nasional. Dengan demikian, data yang diolah bersifat sekunder, yaitu berupa teks tertulis yang telah dipublikasikan sebelumnya, bukan data lapangan primer. Strategi ini selaras dengan prinsip studi pustaka atau library research yang lazim digunakan ketika topik penelitian bersifat teori, konsep, dan analisis dokumen. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai literatur yang telah terkumpul, bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi makna serta relevansi konsep-konsep kunci mengenai peran Pancasila sebagai dasar filosofis integrasi nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa kajian yang dihasilkan memiliki landasan teoretis yang kuat dan mampu menyajikan sintesis komprehensif dari perspektif-perspektif yang berbeda dalam kerangka akademik yang teruji.

Setelah literatur terkait dikumpulkan, peneliti menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji dan menafsirkan isi teks. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi makna, tema, dan pola yang muncul dalam literatur, khususnya mengenai bagaimana Pancasila digambarkan sebagai dasar ideologi dan instrumen pemersatu, serta bagaimana literatur menyikapi tantangan sosial, perbedaan, dan upaya integrasi nasional. Dengan *content analysis*, peneliti tidak sekadar merangkum isi, tetapi juga mengeksplorasi nuansa nilai, simbol, dan interpretasi atas konsep integrasi dan persatuan dalam konteks Indonesia (Sirilakshmi & Bunkar, t.t.).

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan literatur relevan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, hal ini untuk memastikan bahwa perspektif dan data yang dianalisis mencerminkan kondisi sosial, politik, dan kebhinekaan terkini di Indonesia. Pemilihan literatur dilakukan secara sistematis, dengan mempertimbangkan relevansi terhadap tema: Pancasila, integrasi nasional, tantangan sosial, dan keragaman. Teknik penyaringan literatur termasuk seleksi berdasarkan kata kunci ("Pancasila", "integrasi nasional", "toleransi sosial", "keragaman Indonesia"), serta kriteria inklusi dan eksklusi tertentu agar hanya literatur dengan fokus relevan yang dianalisis. Langkah ini serupa dengan prosedur dalam tinjauan literatur sistematis, meskipun penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, bukan meta-analisis (Pengampu & Pranatawijaya, t.t.). Selanjutnya, literatur yang telah terseleksi akan diolah menggunakan metode analisis konten kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana konsep Pancasila berperan sebagai variabel pemersatu dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang berpotensi mengancam disintegrasi bangsa. Proses analisis ini melibatkan tahap kategorisasi, reduksi data, dan interpretasi temuan untuk mengidentifikasi pola, argumen kunci, dan pandangan yang dominan mengenai implementasi nilai-nilai dasar Pancasila dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif dan terstruktur.

Setelah memilah literatur, peneliti melakukan klasifikasi isu: membedakan antara kajian tentang peran Pancasila, termasuk aspek ideologi, nilai, dan Sejarah, dengan kajian tentang tantangan sosial dan perbedaan di Indonesia, misalnya konflik sosial, intoleransi, ketimpangan, atau

isu identitas. Klasifikasi ini membantu dalam menyusun kerangka analisis: bagian mana yang membahas fungsi Pancasila, dan bagian mana yang membahas masalah dan hambatan integrasi nasional. Selanjutnya, peneliti mengaitkan hasil klasifikasi itu dengan nilai-nilai dasar Pancasila, untuk menganalisis bagaimana Pancasila dapat berkontribusi sebagai strategi integrasi dan bagaimana ia dapat menghadapi tantangan kontemporer.

Dalam tahapan terakhir, analisis dilakukan secara kritis dan interpretatif: peneliti membaca ulang teks literatur, melakukan koding terhadap tema-tema utama (persatuan, toleransi, keadilan sosial, keragaman budaya, nilai kebangsaan), lalu mensintesis temuan-temuan ke dalam narasi yang koheren. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengekstrak insight konseptual bukan sekadar fakta deskriptif mengenai relevansi Pancasila dalam konteks Indonesia hari ini. Dengan metode seperti ini, penelitian dapat menawarkan pemahaman yang mendalam dan lebih holistik mengenai hubungan antara ideologi negara dan realitas sosial, serta memberikan landasan teoritis yang kuat untuk rekomendasi strategi penguatan integrasi nasional melalui internalisasi nilai Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pancasila dalam Integrasi Nasional

Kajian literatur mengenai peran Pancasila menunjukkan secara konsisten bahwa Pancasila memainkan peran mendasar dalam memperkuat integrasi nasional Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pemersatu dalam keberagaman suku, budaya, dan agama, sebagai dasar pembentukan karakter kebangsaan, serta sebagai pedoman nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa penelitian menyebut bahwa Indonesia, dengan keberagamannya seperti suku, agama, budaya, bahasa membutuhkan landasan ideologis yang mampu menyatukan perbedaan tersebut dalam satu identitas nasional (Haloho dkk., 2024). Dalam hal ini, Pancasila dianggap sebagai “common platform” yaitu fondasi bersama yang diakui dan dijunjung oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga keragaman bukan dilihat sebagai hambatan tetapi sebagai kekayaan bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila, terutama sila pertama dan sila ketiga, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman keyakinan dan persatuan nasional. Dengan demikian, Pancasila membantu menjaga kerukunan antar komunitas berbeda dan mengurangi potensi konflik karena perbedaan identitas. Penelitian deskriptif kualitatif melalui literature review menunjukkan bahwa di banyak daerah di Indonesia, penerapan nilai Pancasila melalui pendidikan, kebijakan publik, maupun kehidupan sehari-hari menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dan toleransi (Anindita & Hidayati, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya simbol formal, melainkan realitas hidup yang dijalani oleh masyarakat dalam interaksi antar kelompok yang berbeda.

Pancasila juga diposisikan sebagai sumber etika dan moralitas dalam pembuatan kebijakan publik dan penyelenggaraan negara, yang secara langsung mendukung stabilitas dan integritas bangsa. Berdasarkan tinjauan pustaka, dimensi implementatif Pancasila terlihat dalam penentuan arah pembangunan nasional, di mana nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial menjadi landasan bagi perumusan undang-undang dan program pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara harus berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang primordial, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan keadilan yang merata di berbagai daerah. Ketaatan pada nilai-nilai dasar tersebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel, yang pada

gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menjamin keutuhan wilayah serta persatuan ideologis.

Temuan dari penelitian literatur juga menyebut Pancasila sebagai basis karakter kebangsaan dan identitas nasional. Hal ini tercermin dalam pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses pembelajaran (Thoriq Abdul Aziz, 2024). Misalnya, dalam konteks pendidikan modern abad ke-21, studi menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai kerangka pembentukan karakter siswa, tidak hanya aspek akademik, tetapi juga aspek moral, etika, dan nasionalisme (Masykur, 2024). Pancasila menjadi pedoman dalam mendidik generasi muda agar memiliki rasa tanggung jawab sosial, toleransi, dan kesadaran kebangsaan. Selain itu, Pancasila sebagai identitas nasional membantu memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa: meskipun berasal dari latar suku, agama, atau budaya berbeda, warga diikat oleh nilai bersama sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila membantu membangun karakter kebangsaan yang inklusif, pluralistik, tetapi tetap bersatu.

Tantangan Sosial dan Perbedaan di Indonesia

Beberapa studi menunjukkan bahwa intoleransi antaretnis, antaragama, maupun antargolongan tetap menjadi sumber keretakan sosial meskipun konstitusi dan ideologi negara (Pancasila) telah menegaskan pluralitas sebagai bagian dari identitas bangsa (Tanamal & Siagian, 2022). Misalnya, dalam penelitian yang mengkaji intoleransi di Indonesia pasca-perubahan sistem pemerintahan, ditemukan bahwa meskipun nilai-nilai Pancasila diakui sebagai landasan persatuan, praktik intoleransi tetap terjadi: diskriminasi terhadap agama/etnis minoritas, tindakan kekerasan berbasis SARA, hingga marginalisasi kelompok tertentu (Tsaabitah, t.t.). Selain itu, di era globalisasi dan arus informasi cepat, identitas kultural dan agama cenderung menjadi alat mobilisasi kelompok, sehingga ego kolektif suku/agama dapat muncul dan memperkuat polarisasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberagaman suku, agama, budaya yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa, justru dapat berubah menjadi sumber konflik jika nilai toleransi, kemanusiaan, dan persatuan tidak dijaga secara konsisten. Hal ini menjadikan integrasi nasional tetap rentan terhadap disintegrasi identitas.

Temuan literatur juga mengindikasikan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia turut menjadi tantangan terhadap integrasi nasional. Ketimpangan ini dapat berupa kesenjangan akses pendidikan, kesempatan kerja, serta distribusi ekonomi antara wilayah maju dan tertinggal, perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok sosial tertentu. Sebagai contoh, penelitian terbaru menggunakan dataset nasional menunjukkan disparitas gender dan pemberdayaan di berbagai provinsi, meskipun secara agregat indeks kemajuan meningkat, tetapi ketimpangan tetap nyata di wilayah tertentu (Muthmaina, 2024). Ketimpangan semacam ini dapat memunculkan rasa ketidakadilan, kecemburuan sosial, dan alienasi bagi kelompok yang merasa tertinggal. Dalam konteks pluralitas Indonesia, ketimpangan menjadi pemicu polarisasi sosial, kelompok yang merasa termarginalkan bisa memunculkan sentimen negatif terhadap kelompok lain atau terhadap “pusat”. Temuan ini menegaskan bahwa aspek ekonomi sosial tidak bisa dilepaskan dari isu integrasi nasional. Dengan demikian, integrasi nasional ideal memerlukan perhatian pada keadilan sosial dan distribusi sumber daya agar seluruh warga merasa menjadi bagian setara dari negara sesuai semangat nilai “keadilan sosial bagi seluruh rakyat” dalam Pancasila.

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa arus ide, budaya, dan gaya hidup baru ke Indonesia termasuk penetrasi ideologi asing, baik dalam bentuk budaya pop, ide politik, maupun identitas sosial. Dalam konteks masyarakat multikultural, beberapa literatur memperingatkan bahwa arus globalisasi berpotensi melemahkan kesadaran kolektif atas identitas nasional dan toleransi lokal. Buku baru yang menelaah kebencian dalam masyarakat multikultural di era globalisasi menyebut bahwa globalisasi memperluas jangkauan ideologi, terkadang membawa ide yang mengancam harmoni sosial ketika tidak disaring oleh nilai-nilai lokal/bangsawan (Haq, 2025). Sebagai akibatnya, terjadi fragmentasi identitas, sebagian orang mungkin lebih terpengaruh oleh identitas global atau transnasional, sementara sebagian lain tetap berpegang pada identitas lokal atau nasional. Fragmentasi semacam ini bisa mengikis rasa kebangsaan bersama, memperlemah solidaritas sosial, dan memperkecil ruang kompromi antar kelompok.

Era digital dan media sosial telah menjadi ladang subur bagi penyebaran informasi, tetapi juga bagi hoaks, ujaran kebencian (hate speech), provokasi SARA, dan konten diskriminatif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian di Indonesia dilakukan secara verbal maupun non-verbal, baik secara offline maupun online; media sosial menjadi medium utama penyebarannya (Irawan, 2018). Misalnya, penelitian terbaru menyebutkan bahwa di era digital 4.0, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian secara massif telah mengganggu kohesi sosial dan merusak toleransi yang sudah dibangun, sehingga integrasi nasional menjadi terancam (Apriliani dkk., t.t.). Dataset kontemporer yang dikembangkan untuk mengkaji hate speech berbahasa Indonesia menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir terjadi lonjakan signifikan dalam volume ujaran kebencian daring terhadap kelompok rentan, termasuk minoritas agama, etnis, dan kelompok marginal lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan integrasi malah bisa menjadi alat disintegrasi jika tidak diimbangi dengan literasi digital, etika bermasyarakat, dan kesadaran kebangsaan.

Selain faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang telah disebutkan, lemahnya aspek penegakan hukum dan regulasi negara juga menjadi variabel penting yang menguji ketahanan integrasi nasional. Ketidaktegasan dalam penanganan kasus intoleransi, diskriminasi berbasis SARA, maupun tindak pidana korupsi yang memperparah ketimpangan ekonomi dapat menimbulkan preseden buruk di mata publik. Apabila mekanisme hukum dan kelembagaan negara tidak berfungsi secara imparial, hal ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, terutama di kalangan kelompok minoritas atau marjinal. Rasa ketidakpercayaan dan hilangnya harapan terhadap keadilan yang dijamin oleh negara akan memperkuat sentimen identitas primordial, sebab kelompok yang merasa dirugikan cenderung mencari perlindungan dan solidaritas pada kelompoknya sendiri, alih-alih pada negara. Kondisi ini menciptakan jurang pemisah antara warga negara dan pemerintah, yang pada gilirannya dapat memicu atau membenarkan tindakan-tindakan yang mengancam persatuan bangsa.

Implikasi Temuan terhadap Integrasi Nasional

Hasil kajian literatur ini menegaskan bahwa integrasi nasional sebagai konsep tidak hanya bergantung pada pengakuan resmi terhadap keberagaman (seperti kebijakan, hukum, atau deklarasi), tetapi juga sangat tergantung pada dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan informasi. Ketika salah satu aspek, seperti toleransi, keadilan sosial, identitas bersama, atau etika informasi terganggu, persatuan bangsa menjadi rentan. Misalnya, konflik identitas dan intoleransi bukan semata problem

identitas, tetapi dapat diperparah oleh ketimpangan ekonomi dan sosial; ketidakadilan dapat memunculkan rasa ketidakpuasan yang digabungkan dengan sentiment identitas. Globalisasi memperkenalkan ide dan gaya hidup baru, namun tanpa filter nilai nasional yang kuat, bisa memundurkan kohesi sosial. Sedangkan media sosial, jika tidak diimbangi literasi dan etika, dapat mempercepat disintegrasi melalui penyebaran hate speech dan hoaks. Dengan demikian, strategi penguatan integrasi nasional tidak bisa hanya bersifat simbolik atau struktural (hukum/politik), tapi harus menyentuh aspek mental, kultural, dan edukatif termasuk penguatan nilai kebangsaan, keadilan sosial, literasi digital, dan penghormatan terhadap pluralitas.

Oleh karena itu, upaya pemeliharaan integrasi nasional menuntut pendekatan multisektoral yang sinergis. Selain penegakan hukum dan perbaikan struktural dalam sistem pemerintahan, implementasi praktis nilai-nilai kebangsaan perlu diarusutamakan melalui sektor pendidikan, dimulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, untuk menanamkan kesadaran kritis terhadap isu identitas, etika bermedia, dan pentingnya empati sosial. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bergerak bersama untuk menciptakan ruang publik yang inklusif, memastikan setiap warga negara merasa diakui, dan bersama-sama merumuskan narasi kebangsaan yang berkesinambungan serta relevan dengan tantangan kontemporer, menjadikan integrasi sebagai sebuah proses sosial-kultural yang aktif dan berkelanjutan, bukan sekadar status hukum semata.

Analisis Integrasi Nasional dan Tantangan di Indonesia

Dalam literatur terkini, banyak penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai fondasi ideologis dan moral untuk menjaga integrasi nasional di tengah keragaman sosial, agama, dan budaya di Indonesia (Anindita & Hidayati, 2025). Sebagaimana ditemukan dalam penelitian di “Pancasila Village”, nilai-nilai Pancasila terbukti memperkuat sikap toleransi dan harmoni antar umat beragama secara lokal (Shofa dkk., 2023). Berdasarkan temuan ini, dalam bagian berikut akan dikaji bagaimana setiap sila Pancasila dapat dihubungkan dengan strategi menghadapi tantangan sosial dan perbedaan, serta implikasi strategisnya untuk integrasi nasional.

Pancasila dan Lima Sila dalam Menghadapi Tantangan Sosial dan Perbedaan

Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila memiliki potensi normative dan praktis untuk meredam berbagai konflik sosial yang disebabkan perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan.

Sila pertama menegaskan bahwa Indonesia menerima keberagaman agama dan kepercayaan sebagai bagian dari pluralitas bangsa. Dengan landasan ini, Pancasila mendukung penghormatan terhadap kebebasan beragama sekaligus menolak upaya pemaksaan satu agama atas agama lain, sebuah sikap penting dalam menangkal diskriminasi berbasis agama. Internalisasi nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa” melalui pendidikan dan dialog antaragama efektif dalam memperkuat kerukunan beragama. Dengan demikian, ketika nilai ini dihayati, potensi konflik agama bisa dikurangi, dan kesetaraan perlakuan terhadap semua pemeluk agama bisa ditegakkan, membantu menjaga integrasi di masyarakat majemuk.

Sila kedua mengandung nilai-nilai kemanusiaan, rasa menghormati martabat manusia, keadilan, empati, serta sikap beradab. Nilai ini menjadi dasar normatif bagi sikap toleran, menghargai perbedaan, dan menjaga hak asasi manusia. Pancasila berfungsi sebagai kerangka moral bagi demokrasi inklusif dan toleransi sosial. Dalam konteks sosial di Indonesia, sila ini dapat mendukung upaya membangun lingkungan sosial yang saling menghormati, mengurangi diskriminasi, baik agama,

etnis, maupun budaya, serta memupuk solidaritas antarkelompok. Ini penting dalam konteks pluralitas bangsa, agar perbedaan tidak dipolitisasi sebagai penyebab perpecahan.

Sila ketiga secara eksplisit menekankan pentingnya persatuan bangsa di tengah keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila adalah “alat pemersatu bangsa” dalam menghadapi fragmentasi sosial dan identitas. Sebagai contoh, penelitian kasus intoleransi, seperti kejahatan berbasis identitas menunjukkan bahwa penerapan nilai persatuan dapat menjadi landasan ideologis untuk menolak separatisme dan diskriminasi (Pratama dkk., 2015). Dengan demikian, sila ini mendasari kesadaran kolektif sebagai “bangsa Indonesia” bukan sekedar suku atau agama dan mendorong identitas nasional di atas identitas sektoral. Ini sangat penting untuk menjaga integrasi nasional dalam situasi perbedaan yang kompleks.

Sila keempat mengandung prinsip musyawarah dan demokrasi, bahwa keputusan diambil melalui diskusi dan pertimbangan bersama, bukan paksaan atau dominasi satu kelompok. Nilai ini relevan dalam penyelesaian konflik sosial, perbedaan pendapat, dan ketegangan antar kelompok. Penerapan musyawarah memungkinkan dialog lintas agama, etnis, dan budaya untuk menyelesaikan permasalahan tanpa kekerasan, serta memberi ruang partisipasi seluruh anggota masyarakat sebagai warga negara. Demokrasi berbasis Pancasila dapat menjadi instrumen inklusif untuk menanggulangi intoleransi dan keinginan dominasi identitas tertentu. Dengan demikian, sila keempat mendukung integrasi melalui keterlibatan seluruh warga dalam proses pengambilan keputusan, menghormati perbedaan, dan menjunjung musyawarah.

Sila kelima menekankan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang. Ketidakadilan sosial dan ekonomi bisa menjadi akar ketidakpuasan, diskriminasi struktural, bahkan konflik sosial. Dalam konteks integrasi nasional, jika ada ketimpangan, misalnya kesenjangan antar wilayah, suku, agama, atau kelompok ekonomi, maka solidaritas nasional bisa melemah. Penerapan nilai keadilan sosial melalui kebijakan inklusif, distribusi pembangunan, dan pengurangan kesenjangan adalah elemen dasar untuk menjaga persatuan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, sila kelima memberi landasan normatif bahwa integrasi nasional tidak hanya soal toleransi budaya/agama, tapi juga soal keadilan dan kesejahteraan bersama.

Strategi Implementasi Berdasarkan Nilai Pancasila

Penguatan pendidikan Pancasila dan karakter di semua jenjang. Pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat menanamkan nilai toleransi, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sejak usia dini. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian di sekolah menengah, implementasi nilai Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari terbukti meningkatkan toleransi dan penghormatan antar siswa dari latar belakang berbeda (Ilmi dkk., 2024). Dengan demikian, sekolah serta lembaga pendidikan formal lainnya berperan sangat strategis sebagai “laboratorium” internalisasi nilai kebangsaan dan integrasi.

Optimalisasi peran pemerintah dalam kebijakan antiradikalisme dan pemerataan pembangunan. Pemerintah, sebagai pemegang kebijakan publik, perlu menerjemahkan nilai sila Pancasila ke dalam regulasi maupun program Pembangunan, misalnya kebijakan desentralisasi yang adil, pembangunan daerah tertinggal, penegakan hukum antidiskriminasi, serta program deradikalisasi berbasis moderasi. Internalisasi nilai Pancasila dalam program deradikalisasi dan moderasi keagamaan dapat mengurangi risiko ekstremisme dan meningkatkan toleransi. Selain itu, distribusi pembangunan yang merata dan kebijakan sosial yang inklusif sangat penting agar warga

merasa dilibatkan dan adil, sehingga tidak ada kelompok yang merasa tertinggal sehingga resah terhadap sistem.

Peran masyarakat dan tokoh publik dalam menjaga harmoni sosial. Integrasi nasional tidak bisa hanya menjadi urusan elit atau pemerintah, masyarakat sipil, pemuka agama, tokoh adat, komunitas lokal, dan pemuda harus aktif mengambil peran. Ketika komunitas lokal menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui gotong royong, interaksi lintas agama/etnis, dialog antar kelompok, dan kegiatan sosial Bersama. Hal ini memperkuat kohesi sosial dan saling pengertian. Partisipasi aktif masyarakat dan tokoh publik dalam menyuarakan toleransi, persatuan, dan keadilan adalah bagian dari implementasi nyata Pancasila.

Implikasi dari Hasil Analisis

Pancasila melalui lima silanya, bukan sekadar slogan atau simbol formal, melainkan sumber nilai normatif dan pedoman praktis dalam menjaga integrasi nasional. Untuk menjawab tantangan sosial dan perbedaan di Indonesia kontemporer, termasuk intoleransi, diskriminasi, ketimpangan sosial, radikalisme, implementasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan secara konsisten dan sistematis. Pertama, integrasi nasional harus dibangun melalui pendidikan karakter sejak dini dan berkelanjutan, agar generasi muda memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar hafal sila. Kedua, kebijakan negara harus pro-keadilan, inklusif, dan sensitif terhadap pluralitas agar rasa keadilan dan kesetaraan masyarakat tetap terjaga. Ketiga, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan tokoh publik harus dilibatkan aktif sebagai pelaku, bukan hanya objek. Keempat, upaya literasi dan moderasi di dunia digital menjadi semakin penting, mengingat ruang online berpotensi memperkuat perpecahan jika nilai kebangsaan tidak diperkuat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun era modern menghadirkan tantangan baru seperti globalisasi, disinformasi, pergeseran nilai, tekanan ekonomi. Pancasila tetap relevan sebagai “lem perekat” bangsa. Namun, efektivitasnya tergantung pada komitmen kolektif: negara, institusi pendidikan, masyarakat, dan setiap warga.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran sentral dalam menjaga integrasi nasional sebagai dasar ideologis yang menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam dari segi suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai dalam setiap sila menjadi pedoman dalam membangun sikap saling menghargai, toleransi, persatuan, dan keadilan sosial. Dalam konteks tantangan sosial saat ini, seperti intoleransi, kesenjangan ekonomi, konflik identitas, serta arus informasi negatif di media digital, implementasi nilai Pancasila menjadi solusi kunci untuk memperkuat persatuan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologi, tetapi harus diinternalisasi sebagai karakter dasar masyarakat Indonesia, baik melalui kebijakan pemerintah, sistem pendidikan, maupun praktik kehidupan sosial sehari-hari.

Konsekuensi logis dari temuan tersebut adalah perlunya penguatan internalisasi nilai Pancasila berbasis konteks kekinian yang relevan dengan tantangan era globalisasi. Dalam praksis pendidikan, termasuk Pendidikan Islam, penguatan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui kurikulum yang menanamkan moderasi beragama, toleransi sosial, dan keadilan antarsesama. Hal ini akan membantu menciptakan generasi yang tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai kemanusiaan dan persatuan sesuai dengan prinsip Pancasila. Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji bentuk implementasi yang lebih konkret

terutama di daerah yang memiliki potensi konflik tinggi, sehingga hasil kajian dapat memberikan kontribusi nyata dalam mempertahankan keutuhan NKRI melalui pendekatan pendidikan dan kebijakan sosial yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, G. K., & Hidayati, N. (2025). *PENGUATAN INTEGRASI NASIONAL MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA*. 05(01).
- Apriliani, N., Hardiyanti, D. S., Rizqia, S. N., Yusuf, Z. A., & Fitria, R. (t.t.). *Pancasila sebagai Solusi dalam Mengatasi Tantangan Sosial di Era Digital*.
- Fethullah, G. (t.t.). *Education from cradle to grave—Fethullah Gülen’s Official Web Site*. Diambil 28 Mei 2019, dari <https://fgulen.com/en/fethullah-gulens-works/toward-a-global-civilization-of-love-and-tolerance/education/25271-education-from-cradle-to-grave>
- Fifi, N. (2015). *Model Pendidikan Karakter di Pesantren (Studi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak dan Muallimin Muallimat Yogyakarta* [Doctoral, UIN Sunan Kalijaga]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/23812/>
- Gani, F. A. D., & Sembiring, M. Y. G. (2023). Mengenal Identitas dan Integrasi Nasional Indonesia. *Creative Commons Attribution 4.0 International License*, 1(2).
- Gopaldas, A. (2016). A front-to-back guide to writing a qualitative research article. *Qualitative Market Research: An International Journal*, 19(1), 115–121. <https://doi.org/10.1108/QMR-08-2015-0074>
- Haloho, O., Siburian, A. Y. K., Sianturi, S. M., & Butarbutar, J. (2024). Mengenal Identitas dan Integrasi Nasional Indonesia. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(2), 475–483. <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3026>
- Haq, M. Z. (2025). *STUDI KEBENCIAN DALAM KONTEKS MASYARAKAT MULTIBUDAYA DAN RELIGI DI ERA GLOBALISASI*. https://www.researchgate.net/publication/391959143_STUDI_KEBENCIAN_DALAM_KONTEKS_MASYARAKAT_MULTIBUDAYA_DAN_RELIGI_DI_ERA_GLOBALISASI
- Ilmi, M. B., Akbar Siregar, H., & Rafli Chesio, M. (2024). Implementation of pancasila values to improve tolerance between religions and tribes. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 5(2), 270. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v5i2.85080>
- Irawan. (2018). Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1).
- Lickona, T. (2009). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Ma`arif, M. A., & Kartiko, A. (2018). Fenomenologi Hukuman di Pesantren: Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik. *Nadwa*, 12(1), 181–196. <https://doi.org/10.21580/nw.2018.12.1.1862>
- Masykur, Z. M. (2024). Pancasila Philosophy and Its Contribution to the Development of Golden Indonesia 2045. *Jurnal Dinamika*, 5(1), 81–104. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v5i1.81-104>
- Muthmaina, J. S. (2024). *The Femininomenon of Inequality: A Data-Driven Analysis and Cluster Profiling in Indonesia* (No. arXiv:2412.00012). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.00012>
- Pengampu, D., & Pranatawijaya, V. H. (t.t.). *LITERATURE REVIEW METODOLOGI PENELITIAN*.
- Pratama, B. A., Purwitasari, C. V., Jannah, N. A., Dyah, R., & Fayza, N. (2015). *Melawan Intoleransi Melalui Nilai Sila ke-3 Pancasila Studi Kasus: Pembakaran Gereja di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015*.

- Sa'duh, S., & Nelwati, S. (2024). Memperkuat Integrasi Nasional di Tengah Keberagaman Indonesia. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 3(3), 201–207. <https://doi.org/10.58192/insdun.v3i3.2286>
- Shofa, A. M. A., Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., Tijow, L. M., & Ariska, F. (2023). Exploring Tolerance Practices in the Pancasila Village. Dalam A. Nugroho Widiadi, S. Osman, I. Idris, & A. Mohd Tayeb (Ed.), *Proceeding of the 3rd International Conference on Social Knowledge Sciences and Education (ICSKSE) 2023"Change and Continuity in Southeast Asia"* (Vol. 800, hlm. 181–188). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-168-5_17
- Sirilakshmi, Y., & Bunkar, R. C. (t.t.). *CONTENT ANALYSIS IN QUALITATIVE RESEARCH: IMPORTANCE AND APPLICATION*.
- Taher, P. (2021). Pancasila as The Basis of The State Unity of The Republic of Indonesia. *Pancasila and Law Review*, 2(2), 133–140. <https://doi.org/10.25041/plr.v2i2.2449>
- Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2022). Pancasila Value Implementation In Handling Intolerance In Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(3).
- Thoriq Abdul Aziz. (2024). THE ROLE OF PANCASILA AS THE NATION'S IDEOLOGY IN DEVELOPING EDUCATION IN FAVOR OF STUDENTS. *Cakrawala: Journal of Citizenship Teaching and Learning*, 2(1), 40–46. <https://doi.org/10.70489/cakrawala.v2i1.331>
- Tsaabitah, A. Q. (t.t.). *POLITIK IDENTITAS DAN TANTANGAN KEBHINEKAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG INKLUSIF DAN PROGRESIF*.